

(Original Article)

Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Merdeka Belajar Di Upt Sd Negeri 114 Kabupaten Pinrang

Herliza ¹, Abdi ², Haerana ³

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Correspondence: Herlizaherman977@gmail.com

Abstrak : Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Merdeka Belajar Di UPT SD Negeri 114 Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deksriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak di UPT SD Negeri 114 Kabupaten Pinrang sudah efektif dimana komunikasinya bisa dalam bentuk formal melalui surat resmi dan pertemuan tatap muka. Selain itu, ketersediaan sumber daya yakni tenaga pendidik, fasilitas fisik, dan teknologi, telah dikelola dengan baik untuk mendukung Program Sekolah Penggerak dan Merdeka Belajar. Disposisi pelaksana Dukungan dari kepala sekolah, adaptasi guru terhadap metode inovatif, serta respons positif siswa terhadap pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Struktur birokrasi berperan dalam mendukung implementasi Program Sekolah Penggerak melalui bimbingan teknis, pelatihan, pendanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: *Implementasi Program, Sekolah Penggerak, Merdeka Belajar*

1. Pendahuluan/*Introduction*

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak bahwa menetapkan program Sekolah Penggerak sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil Pelajar Pancasila.

Sekolah penggerak menurut Zamjani et al.,(2020) merupakan program yang berfokus untuk mengembangkan hasil belajar peserta didik secara holistik sehingga dapat mewujudkan profil Pelajar Pancasila yang meliputi kemampuan literasi dan numerasi serta karakter. Inti dari implementasi program Sekolah Penggerak yaitu Merdeka belajar. Merdeka belajar

bertujuan untuk mengembalikan sistem Pendidikan nasional kepada esensi Undang-undang melalui kemerdekaan sekolah, guru dan peserta didik sehingga dapat bebas berinovasi, bebas belajar secara mandiri dan kreatif yang diawali oleh guru dalam menjadi penggerak pendidikan nasional (Alfaeni, 2022).

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Di Indonesia, kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas nasional untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas pembelajaran, kesenjangan akses pendidikan, serta pendekatan yang kurang adaptif terhadap perubahan global. Menanggapi tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek memperkenalkan kebijakan besar yang dikenal dengan merdeka belajar.

Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, bertujuan memberikan kebebasan kepada institusi pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran secara lebih inovatif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Fokus utama kebijakan ini adalah pada otonomi sekolah dan pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Salah satu program kunci dalam upaya ini adalah Program Sekolah Penggerak, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kompetensi guru, perubahan kurikulum, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

Kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengenai Sekolah Penggerak merupakan bagian dari visi Merdeka Belajar yang digagas oleh bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 1 Februari 2021. Program ini dirancang sebagai upaya untuk mentransformasi sistem pendidikan Indonesia dengan menciptakan

sekolah-sekolah unggulan yang dapat menjadi katalisator perubahan bagi sekolah lain di sekitarnya. (Patilima, 2022) Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kapasitas guru dan kepala sekolah, serta penciptaan ekosistem pendidikan yang berpusat pada siswa. Sekolah Penggerak diharapkan mampu menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel, metode pembelajaran inovatif, dan pendekatan berbasis proyek untuk mengembangkan kompetensi siswa secara holistik. Program ini juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Melalui pendampingan intensif selama tiga tahun, Kemendikbudristek bertujuan memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini, sekaligus menyebarkan praktik-praktik baik yang dihasilkan ke sekolah sekolah lain di seluruh Indonesia (Irmayanti et al., 2023).

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan salah satunya seperti yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang didalamnya mencakup dasar dan tujuan, penyelenggaraan pendidikan termasuk wajib belajar, penjamin kualitas pendidikan serta peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut dibuat untuk menghasilkan Pendidikan Indonesia yang baik dan lulusan berkualitas di sektor jenjang pendidikan. Untuk mendukung hal tersebut dan dalam rangka mempercepat peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik untuk memiliki kompetensi abad 21, diperlukan sinergisitas program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan yang dilaksanakan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui, Peraturan Sekretaris Jendral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Organisasi Penggerak Untuk Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kebijakan Dinas Pendidikan mengenai Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendukung dan memperkuat implementasi program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Kemendikbudristek). Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran kunci dalam memastikan program ini berjalan efektif di wilayahnya. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek, seperti koordinasi dengan Kemendikbudristek untuk memilih sekolah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai Sekolah Penggerak, serta memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada sekolah sekolah terpilih. Dinas Pendidikan juga mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pelatihan guru, pengembangan infrastruktur, dan pembelian alat pembelajaran yang dibutuhkan.

Selain itu, Dinas Pendidikan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Mereka juga bertanggungjawab untuk menyebarluaskan praktik praktik baik yang dihasilkan dari Sekolah Penggerak ke sekolah sekolah lain di wilayahnya melalui workshop, seminar, atau publikasi. Dengan demikian, Dinas Pendidikan berperan sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat daerah, sekaligus memastikan bahwa transformasi pendidikan melalui Sekolah Penggerak dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Salah satu dari program Merdeka Belajar adalah Program Sekolah Penggerak yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul yaitu kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain untuk meningkatkan mutu serupa sehingga dapat mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju (Kemendikbudristek, 2021).

Program Sekolah Penggerak merupakan inisiatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2021. Program ini bertujuan untuk mempercepat transformasi dan peningkatan mutu

pendidikan di Indonesia melalui peningkatan kualitas sekolah secara holistik. Sekolah Penggerak diharapkan menjadi model percontohan bagi sekolah-sekolah lain untuk menjalankan kebijakan Merdeka Belajar dan mengimplementasikan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan siswa.

Program Sekolah Penggerak merupakan upaya strategis untuk mewujudkan visi Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa dalam menentukan metode pembelajaran yang paling sesuai. Dengan fokus pada peningkatan mutu pembelajaran, literasi, numerasi, dan pengembangan keterampilan holistik, program ini bertujuan untuk menjadikan sekolah-sekolah di Indonesia sebagai tempat pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkualitas tinggi.

Kebijakan Program Sekolah Penggerak tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 Tentang Program Sekolah Penggerak, kemudian terdapat pembaruan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak. Kebijakan tersebut kemudian kembali mendapatkan pembaruan karena dianggap belum memenuhi kebutuhan kebijakan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sehingga munculah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak dimana kebijakan tersebut adalah kebijakan Program Sekolah Penggerak yang berlaku saat ini.

Hadir sekolah penggerak tidak lain ialah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kehadiran program sekolah penggerak bukan hanya memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun sekolah penggerak memberikan beberapa hal seperti sistem pendampingan khusus selama 3 tahun ajaran untuk transformasi sekolah dimana hal ini tidak ada pada sekolah umum. Penggantian metode pembelajaran konvensional yang sebelumnya yang lebih kaku serta fokus pada pencapaian kurikulum standar yang ada diterapkan pada sistem

sekolah umum, berbeda dengan diberlakukannya program sekolah penggerak dimana pada sekolah penggerak ini menggunakan kurikulum merdeka yang notabenenya lebih fleksibel, pembelajaran berbasis proyek, dan mendorong kolaborasi lintas mata Pelajaran, jika pada sekolah umum fokus pada pencapaian kurikulum standar dengan hadirnya sekolah penggerak ini fokus utama ialah pada kebutuhan individual siswa yang tidak lepas daripada integritas dengan ekosistem pendidikan secara menyeluruh.

Hadirnya sekolah penggerak ini diharapkan adanya invensi holistic dalam pengembangan SDM sekolah melalui program pelatihan berkelanjutan untuk guru dan staf serta mendorong penekanan terhadap kolaborasi antar guru yang sebelumnya pelatihan guru lebih sporadis. Pada implementasi sekolah penggerak sudah menerapkan Profil Pelajar Pancasila (P5) Secara sistematis dan terstruktur dimana pada program ini fokus pada pembentukan karakter berbasis Pancasila juga persiapan siswa menghadapi era digital yang sebelumnya belum diterapkan pada sekolah umum. Pada program ini pula menjunjung kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah menggantikan keterbatasan kordinasi dengan pemerintah daerah sebelumnya.

Tantangan di tahun pertama implementasi Sekolah Penggerak sering kali terkait dengan upaya berbagi pemahaman mengenai Kurikulum Merdeka dan pengimplementasian Profil Pelajar Pancasila (P5) di antara rekan-rekan guru di sekolah. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan tingkat pemahaman, kesiapan, dan penerimaan guru terhadap konsep-konsep baru ini. Kurikulum Merdeka membawa pendekatan yang lebih fleksibel, berfokus pada kebutuhan siswa, dengan pembelajaran berbasis proyek yang membutuhkan kreativitas serta kolaborasi lintas mata pelajaran. Bagi sebagian guru yang terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional, transisi ini dapat terasa menantang (Yansah et al., 2023).

Berdasarkan komponen tersebut, pembelajaran yang harus ditempuh guru-guru pada program Sekolah Penggerak mengacu pada inti dari

Merdeka belajar yang berlandaskan profil Pelajar Pancasila. Menurut Daga (2021) fokus dari merdeka belajar terletak pada kebebasan berpikir bagi guru dan siswa. Dengan kondisi tersebut dapat membentuk kebebasan bagi guru dan siswa sehingga dapat menggali pengetahuan, sikap dan keterampilan secara leluasa dan menyenangkan. Dalam melaksanakan program Sekolah Penggerak guru juga perlu menempuh pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak yang disebut dengan kurikulum merdeka dengan paradigma baru yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Sekolah Penggerak.

Salah satu hal pokok dengan adanya Program Sekolah Penggerak adalah kurikulum merdeka yang harus diimplementasikan oleh guru di sekolah penggerak. Kurikulum merdeka perlu diterapkan pada sekolah penggerak dalam upaya membangun kembali pembelajaran secara holistik yang berlandaskan profil Pelajar Pancasila (Rosmana et al., 2022). Diperkuat oleh pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka berupaya dalam melaksanakan transformasi pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran (Zamjani et al., 2020).

Tentunya perbedaan tersebut terlihat jelas bahwa Program Sekolah Penggerak ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang lebih komprehensif dan adaptif yang dinamis. Namun, setiap program tentunya terdapat tantangan yang akan dihadapi oleh implementor. Tantangan-tantangan ini tidak lepas daripada sarana dan prasarana seperti pada kendala atas infrastuktur yang tentunya akan dihadapi oleh sekolah sekolah atau daerah-daerah terpencil seperti peralatan belajar yang kurang memadai hingga akses internet yang terbatas.

Sumber Daya Manusia juga akan menjadi tantangan dalam program ini karena kesiapan dan penerimaan guru terhadap pemahaman konsep baru, terlebih pada menyelaraskan P5 dengan kurikulum yang ada sehingga

menambah beban kerja guru tentunya ini perlu penyesuaian dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Tidak hanya tantangan yang telah dikemukakan sebelumnya, hambatan birokrasi bisa menjadi salah satu masalah seperti pada masalah pengajuan dana sehingga perlulah pemantauan dan evaluasi yang harus optimal. Beberapa tantangan tersebut memerlukan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, terutama kepala sekolah dan manajemen, serta pada strategi yang aktif berdasarkan pada kondisi lapangan.

UPT SD Negeri 114 Pinrang, sebagai salah satu sekolah dasar di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, telah menjadi bagian dari Program Sekolah Penggerak. Terpilihnya sekolah ini untuk mengikuti PSP bukan tanpa alasan sebab sekolah ini yang menjadi salah satu sentra pendidikan di daerahnya, UPT SD Negeri 114 Pinrang memiliki tanggung jawab besar dalam menyukseskan program ini, terutama dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Selain itu, tantangan geografis dan kultural yang dihadapi oleh sekolah ini menjadikannya representasi yang tepat untuk melihat bagaimana kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal, terutama dalam konteks daerah dengan akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan. Keterbatasan infrastruktur, keragaman budaya, serta karakteristik masyarakat lokal yang unik menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Penguatan dalam implementasi Program Sekolah Penggerak di UPT SD Negeri 114 Pinrang didukung oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses Pendidikan yaitu, kepala sekolah, guru, orang tua dan komunitas, dinas Pendidikan dan pemerintahan daerah, pengawas sekolah dan pelatih ahli. Dukungan dari pihak-pihak ini menjadi penguatan yang sangat penting bagi upt sd negeri 114 pinrang dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak dengan optimal, sehingga peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan dalam Merdeka Belajar dapat tercapai.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui implementasi Program Sekolah Penggerak yang sejalan dengan merdeka belajar, terdapat beberapa sasaran program yang akan dicapai untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif. Pertama, program ini menekankan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa sebagai pondasi utama untuk memperkuat keterampilan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah, yang sangat penting dalam proses belajar mandiri. Kedua, sekolah berfokus pada pengembangan Profil Pelajar Pancasila melalui berbagai kegiatan yang membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti kemandirian, gotong royong, dan integritas. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar secara akademik, tetapi juga tumbuh menjadi individu berkarakter kuat.

Oleh karena itu, penerapan Program Sekolah Penggerak di sekolah ini akan menjadi tolok ukur penting dalam mengukur fleksibilitas Kurikulum Merdeka, sekaligus menilai bagaimana adaptasi strategi pembelajaran dapat mengatasi berbagai kendala lokal dan tetap menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan. Keberhasilan ini juga dapat dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain di daerah terpencil atau marginal untuk menerapkan kebijakan pendidikan secara efektif, meskipun dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi.

Keberhasilan ini juga dapat dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain di daerah terpencil atau marginal untuk menerapkan kebijakan pendidikan secara efektif, meskipun dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kreativitas dan penyesuaian yang cermat terhadap kondisi lokal, serta dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat, sekolah-sekolah di area yang lebih sulit dijangkau pun dapat mengatasi tantangan dan mencapai hasil yang positif. Selain itu, keberhasilan tersebut dapat memotivasi sekolah-sekolah lain untuk mengambil langkah-langkah serupa dan mengadopsi praktik-praktik

yang telah terbukti berhasil, memperluas penerapan kebijakan pendidikan yang inovatif dan inklusif di seluruh wilayah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sekolah penggerak di SDN 114 Pinrang, dengan menekankan pada penggalian makna, proses, serta kondisi faktual yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara objektif dan sistematis berbagai aspek yang diteliti, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan berdasarkan data empiris yang diperoleh dari informan melalui teknik purposive sampling.

Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan yang memiliki pemahaman terhadap objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti data kependudukan dan kepegawaian. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sehingga data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan bermakna. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi data, dan triangulasi waktu, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang tinggi sesuai dengan standar metode penelitian ilmiah (Sugiono, 2020).

3. Hasil Dan Pembahasan

Beberapa hasil wawancara yang telah didapatkan dan dikumpulkan dari berbagai informan terkait Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Merdeka Belajar di UPT SD Negeri 114 Kabupaten Pinrang yang dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak di UPT SD Negeri 114 Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa komunikasi memegang peran krusial dalam implementasi Program Sekolah Penggerak. Pihak sekolah pertama kali mengetahui program ini melalui surat pemberitahuan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi. Program Sekolah Penggerak dilakukan oleh Kemendikbud kepada pemerintah daerah (Bab II.A) dan dilanjutkan oleh pemerintah daerah kepada satuan pendidikan (Bab II.D.1). Mekanisme komunikasi internal di sekolah, seperti rapat rutin, grup WhatsApp, dan papan pengumuman, juga terbukti efektif dalam menyebarkan informasi kepada seluruh warga sekolah.

Pentingnya sosialisasi melalui berbagai media (Bab II.D.1.b), yang sesuai dengan penggunaan grup WhatsApp dan papan pengumuman di sekolah untuk komunikasi internal. Hal ini sejalan dengan temuan di SD Negeri 114, di mana informasi program pertama kali diterima melalui surat resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, diikuti pertemuan sosialisasi tingkat kabupaten. kepala sekolah harus menjadi motor penggerak perubahan, termasuk dalam aspek komunikasi. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam pertemuan umum dan individu juga menjadi faktor pendukung. komunikasi terbuka antara sekolah dan orang tua dapat meningkatkan dukungan terhadap program pendidikan.

Hal ini sejalan dengan tujuan program (Bab I.B.4) untuk membangun iklim kolaboratif antara sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Siswa juga merasa bahwa informasi tentang perubahan metode pembelajaran disampaikan dengan jelas oleh guru dan kepala sekolah. Mereka diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi, sehingga tidak merasa bingung atau tertekan dengan perubahan yang terjadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Febrianto dan Kusuma (2023) yang menunjukkan bahwa komunikasi dua arah antara guru dan siswa dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan siswa terhadap metode

pembelajaran baru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif, baik secara internal maupun eksternal, menjadi kunci keberhasilan implementasi Program Sekolah Penggerak di UPT SD Negeri 114 Kabupaten Pinrang.

Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki sekolah UPT SD Negeri 114 Kabupaten Pinrang telah dikelola dengan cukup baik untuk mendukung implementasi Program Sekolah Penggerak dan pendekatan Merdeka Belajar. Sekolah telah menyiapkan berbagai sumber daya, termasuk tenaga pendidik, fasilitas fisik, dan teknologi, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas guru dilakukan melalui berbagai tahapan, seperti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, workshop internal, pelatihan daring, serta seminar dan konferensi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Suryani dan Widyastuti (2021) yang menyatakan bahwa pelatihan guru yang berkelanjutan dan berfokus pada inovasi pembelajaran merupakan kunci keberhasilan implementasi kurikulum baru. Hal tersebut sejalan dengan Bab II.E.5 KEPMEN yang mewajibkan pelatihan dan pendampingan intensif bagi guru dan kepala sekolah. Di sisi fasilitas fisik, sekolah telah mengoptimalkan ruang kelas untuk mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif, serta memperkuat perpustakaan sebagai sumber referensi.

Hal ini sejalan dengan Bab II.E.7 KEPMEN tentang pembelajaran paradigma baru. Namun, keterbatasan dalam pengadaan alat pembelajaran berbasis teknologi, seperti komputer dan proyektor, masih menjadi tantangan utama hal tersebut berkaitan dengan Bab II.E.6 (akses internet, perangkat TIK). Untuk mengatasi hal ini, sekolah telah berupaya mencari sumber pendanaan tambahan melalui kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan sponsor lokal, serta mengelola dana yang ada secara efisien. Penelitian oleh Handayani dan Setiawan (2023) juga menunjukkan

bahwa kolaborasi dengan pihak eksternal dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi keterbatasan anggaran sekolah.

Disposisi

Disposisi atau sikap seluruh pihak di sekolah UPT SD Negeri 114 Kabupaten Pinrang, termasuk guru, kepala sekolah, dan siswa, sangat mendukung keberhasilan implementasi Program Sekolah Penggerak dan pendekatan Merdeka Belajar. Guru dan kepala sekolah menunjukkan komitmen dan motivasi yang tinggi dalam menghadapi perubahan, meskipun awalnya terdapat beberapa resistensi dari guru yang terbiasa dengan metode pengajaran tradisional.

Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/P/2020 tentang Program Sekolah Penggerak. Dalam Bab II mengenai Ruang Lingkup, dinyatakan bahwa Program Sekolah Penggerak merupakan bagian dari upaya transformasi satuan pendidikan yang mencakup lima intervensi utama: pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Kelima intervensi ini sangat bergantung pada kesiapan dan sikap positif dari seluruh warga sekolah, terutama guru dan kepala sekolah.

Kondisi di UPT SD Negeri 114 juga konsisten dengan penelitian oleh Sari dan Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum baru sangat bergantung pada disposisi guru dan dukungan dari kepala sekolah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa guru yang memiliki sikap positif terhadap perubahan cenderung lebih cepat beradaptasi dan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif.

Lebih lanjut, Bab III dalam KEPMEN 1177/P/2020 menjelaskan tentang Tujuan Program Sekolah Penggerak, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini relevan dengan semangat yang ditunjukkan oleh guru dan kepala sekolah

di UPT SD Negeri 114, yang turut menularkan antusiasme kepada siswa. Siswa mengapresiasi kebebasan untuk mengeksplorasi minat mereka serta metode belajar yang lebih interaktif dan kolaboratif, mencerminkan pergeseran menuju pembelajaran dengan paradigma baru.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, baik di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang maupun di tingkat sekolah, memainkan peran penting dalam mendukung implementasi Program Sekolah Penggerak. Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang memberikan bimbingan teknis, fasilitasi pelatihan, dan memastikan pendanaan yang tepat waktu, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Hal ini sejalan dengan Bab IV KEPMEN 1177/P/2020 tentang Pelaksanaan Program, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Penggerak melibatkan peran aktif dinas pendidikan dalam melakukan pendampingan dan menyediakan dukungan sumber daya. Peran birokrasi sangat penting dalam menjamin kelima intervensi utama program termasuk penguatan SDM sekolah dan perencanaan berbasis data berjalan secara sistematis dan terintegrasi.

Di tingkat sekolah, struktur organisasi yang jelas dan kolaboratif juga menjadi faktor pendukung keberhasilan program. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program, dengan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan program. Hal ini selaras dengan Bab II tentang Ruang Lingkup dalam KEPMEN 1177/P/2020, yang menekankan perlunya penguatan kapasitas SDM dan pembelajaran dengan paradigma baru yang memerlukan kerja tim lintas peran di sekolah.

Koordinasi yang baik dan diskusi terbuka dalam setiap perubahan memastikan pemahaman yang selaras di antara seluruh pihak. Hal ini didukung oleh penelitian dari Handayani dan Setiawan (2023) yang menemukan bahwa struktur organisasi sekolah yang fleksibel dan

kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas implementasi program pendidikan baru. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya peran kepala sekolah dalam memimpin perubahan dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak di UPT SD Negeri 114 Kabupaten Pinrang sudah efektif dimana komunikasinya bisa dalam bentuk formal melalui surat resmi dan pertemuan tatap muka. Selain itu, ketersediaan sumber daya yakni tenaga pendidik, fasilitas fisik, dan teknologi, telah dikelola dengan baik untuk mendukung Program Sekolah Penggerak dan Merdeka Belajar. Disposisi pelaksana Dukungan dari kepala sekolah, adaptasi guru terhadap metode inovatif, serta respons positif siswa terhadap pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Struktur birokrasi berperan dalam mendukung implementasi Program Sekolah Penggerak melalui bimbingan teknis, pelatihan, pendanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Acknowledgments: Terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini..

Declaration of conflicting interests: 'Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Funding: 'Tidak ada dana yang diterima'.

Referensi

- Alfaeni, D. K. N. (2022). Kesiapan Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Pada Program Sekolah Penggerak. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 1–7.
- Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
- Irmayanti, R. W., Marmoah, S., & Sriyanto, M. I. (2023). Implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak dalam perspektif fungsi manajemen di sekolah dasar. *Didaktika Dwija Indria*, 11(2). <https://doi.org/10.20961/ddi.v11i2.75611>
- Kemendikbudristek. (2021). Program Sekolah Penggerak 2021.

Kemdikbud.Co.Id, 4.

- Patilima, S. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Memberikan Motivator. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 00), 228–236.
- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Pitaloka, F. A., Ridho Wardani, M. R., & Salsabila, N. F. (2022). Pengaruh Implementasi Kurikulum Darurat Covid Di Masa Pandemi. *Jurnal Soshum Insentif*, 5(1), 36–44. <https://doi.org/10.36787/jsi.v5i1.688>
- Sugiono, D. (2020). *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta.
- Zamjani, I., Aditomo, A., Pratiwi, I., Solihin, L., Hijriani, I., Utama, B., Anggraena, Y., Felicia, N., Simatupang, S. M., & Djunaedi, F. (2020). Naskah akademik program sekolah penggerak. *Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*.